

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM FENOMENA MIDDLE INCOME TRAP DI INDONESIA

Leni Shofiyan¹⁾, Maryam Batubara²⁾, Mey Yunanda³⁾, Pratiwi Ayu Ningtyas⁴⁾, Servina
Rahayu⁵⁾

lenishofiyan06@gmail.com¹⁾, maryam.batubara@uinsu.ac²⁾, meiyunanda2@gmail.com³⁾,
pratiwiayuningtyasayu@gmail.com⁴⁾,
servinarahayu7@gmail.com⁵⁾

^{1),2),3),4),5)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Kebijakan moneter dan fiskal dalam fenomena Middle Income Trap di Indonesia memiliki pengaruh sangat signifikan. Kebijakan moneter yang bijak dapat mengurangi risiko inflasi dan defisit, sedangkan kebijakan fiskal yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Kebijakan fiskal yang terintegrasi dengan kebijakan moneter dapat membantu Indonesia keluar dari Middle Income Trap. Maka sebab itu, pemerintah butuh menjaga stabilitas makroekonomi dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter yang bijak untuk mengurangi risiko inflasi dan defisit. Selain itu, investasi dalam riset dan pengembangan serta penerapan inovasi dan teknologi dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas. Hilirisasi industri juga dapat membantu meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan daya saing global.

Kata Kunci: Middle Income Trap, Kebijakan Moneter dan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

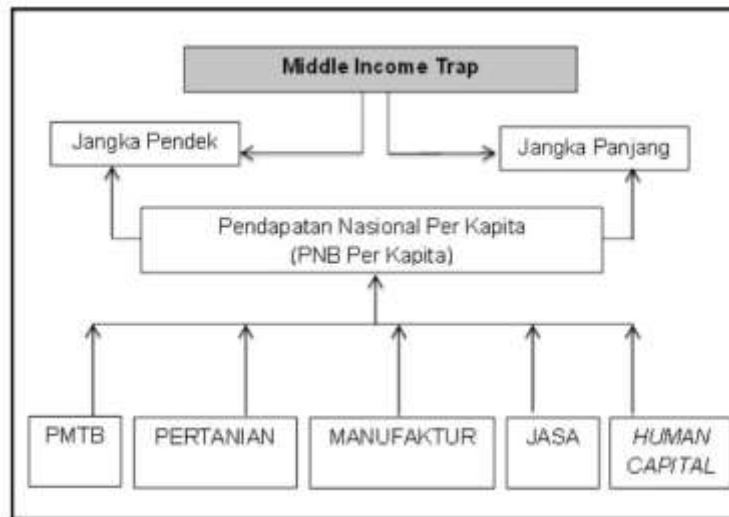
Monetary and fiscal policies in the Middle Income Trap phenomenon in Indonesia have a very significant influence. Wise monetary policy can reduce the risk of inflation and deficits, while effective fiscal policy can increase economic growth and productivity. Fiscal policy that is integrated with monetary policy can help Indonesia get out of the Middle Income Trap. Therefore, the government needs to maintain macroeconomic stability by implementing wise fiscal and monetary policies to reduce the risk of inflation and deficits. In addition, investment in research and development and the application of innovation and technology can increase competitiveness and productivity. Downstreaming the industry can also help increase product added value and increase global competitiveness.

Keywords: Middle Income Trap, Monetary and Fiscal Policy, Economic Growth

PENDAHULUAN

Pada jangka panjang, ketika ekonomi mengalami stagnasi atau bahkan menurun, risiko bagi Indonesia untuk terjebak dalam middle income trap (MIT) semakin besar. MIT didefinisikan sebagai kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara terhenti di level pendapatan menengah, gagal melanjutkan ke tingkat pendapatan tinggi berikutnya seperti yang diuraikan oleh Agenor, Canuto, dan Jelenic dalam World Bank Economic Premise (2012). Jika Indonesia terjebak dalam MIT, hal ini dapat menghambat kemajuan menuju status negara maju serta berpotensi menimbulkan konflik sosial. Selain mempersulit persaingan dengan negara maju, Indonesia juga harus bersaing dengan negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami kondisi ekonomi saat ini di Indonesia guna menghindari atau keluar dari MIT. Upaya strategis pembangunan yang tepat diperlukan agar Indonesia dapat mencapai status negara maju dengan pendapatan yang tinggi pada tahun 2030.

Klasifikasi Bank Dunia, berpendapat jika Indonesia sudah ada pada kategori negara berpenghasilan menengah ke bawah selama 13 tahun terakhir. Perihal ini menampakkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia telah lama stagnan dan memperbesar potensi masuk ke dalam middle income trap (MIT). Riset ini memiliki maksud guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya MIT. Analisis menggunakan Error Correction Model (ECM) untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab serta aksi yang bisa dibagiakan buat jangka panjang. Pada riset ini, buat menentukan apakah Indonesia sudah masuk ke dalam MIT atau belum, dapat dilihat dari GNI per kapita sebagai indikator pendapatan nasional penduduk. Berdasarkan teori transformasi struktural, proses perubahan struktur ekonomi menjadi negara maju umumnya melibatkan transisi bertahap dari sektor pertanian ke sektor industri dan kemudian sektor jasa (Todaro, 2003). Berdasarkan riset terdahulu, hipotesis disusun jika variabel-variabel bebas yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), nilai tambah sektor pertanian, nilai tambah sektor industri pengolahan, nilai tambah sektor jasa, dan human capital yang diwakili oleh tingkat pendidikan tenaga kerja. (Lumbangaol & Pasaribu, 2018). Dapat dilihat dari gambar berikut:



Riset ini memiliki tujuan agar kita memahami hal-hal apa saja yang butuh kita kaji, seperti apa itu middle income trap, kebijakan moneter dan fiskal itu apa, apa penyebab terjadinya middle income tarp, Apa Penyebab Terjadinya Middle Income Trap, Bagaimana Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Middle Income Trap, Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Middle Income Trap Secara Umum, Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Middle Income Trap Secara Syariah, Bagaimana Kebijakan Moneter Dan Fiskal Yang Bijak Dapat Membantu Indonesia Keluar Dari Middle Income Trap, dan lain sebagainya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, sehingga dapat diambil rumusan penelitian, yaitu:

1. Apa Itu Middle Income Trap?
2. Apa Itu Kebijakan Moneter Dan Fiskal?
3. Apa Penyebab Terjadinya Middle Income Trap?
4. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Middle Income Trap?
5. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Middle Income Trap Secara Umum?
6. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Middle Income Trap Secara Syariah?
7. Bagaimana Kebijakan Moneter Dan Fiskal Yang Bijak Dapat Membantu Indonesia Keluar Dari Middle Income Trap?

Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah, penelitian ini bermaksud yakni guna memahami:

1. Middle Income Trap.
2. Kebijakan Moneter Dan Fiskal.
3. Penyebab Terjadinya Middle Income Trap.
4. Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Middle Income Trap.
5. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Middle Income Trap Secara Umum.
6. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Middle Income Trap Secara Syariah.

Kebijakan Moneter Dan Fiskal Yang Bijak Dapat Membantu Indonesia Keluar Dari Middle Income Trap.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Middle Income Trap

Menurut World Bank (2016), pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara berkembang, khususnya di Asia, bermula di tahun 1960-an. Negara-negara yang sebelumnya berada dalam kategori berpenghasilan rendah serta punya pertumbuhan ekonomi yang lambat berhasil tingkatkan tingkat pertumbuhan mereka, alhasil dapat naik ke kategori negara berpenghasilan menengah. Sebelum tahun 2012, pendapatan per kapita di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Penurunan ini menunjukkan jika negara-negara tersebut terjebak dalam middle income trap (MIT), di mana pertumbuhan ekonominya terhenti di tingkat pendapatan menengah serta tidak berhasil melanjutkan ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. (Widyastuti, 2023)

Middle Income Trap (MIT) ialah kondisi yang mana negara yang berada pada tingkat pendapatan menengah gagal mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil untuk naik ke kategori pendapatan tinggi yang baru. Dalam konteks lain, MIT merujuk pada kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara stagnan di tingkat pendapatan menengah serta tidak mampu alami perkembangan yang tinggi. Selanjutnya, negara-negara yang terperangkap dalam MIT sering mengalami kesulitan bersaing dengan negara-negara berpenghasilan rendah dalam hal biaya tenaga kerja di sektor manufaktur, serta kesulitan bersaing dengan negara-negara berpenghasilan tinggi dalam perihal kemampuan serta inovasi.

Mereka tidak berhasil menggeser sumber pertumbuhan ekonomi dari sumber daya berupah rendah dan modal menuju produktivitas yang lebih tinggi. (Malale & Sutikno, 2014)

Bank Dunia mengklasifikasikan negara sesuai pendapatan menjadi beberapa kategori, seperti negara berpenghasilan rendah, negara berpenghasilan menengah ke bawah, negara berpenghasilan menengah ke atas, serta negara berpenghasilan tinggi. Negara berpenghasilan rendah serta negara berpenghasilan menengah ke bawah umumnya diklasifikasikan sebagai negara berkembang, sementara negara berpenghasilan menengah ke atas dan negara berpenghasilan tinggi diklasifikasikan sebagai negara maju. Negara-negara berpenghasilan menengah sering disebut sebagai negara yang terperangkap dalam jebakan pendapatan menengah. Jebakan pendapatan menengah adalah keadaan yang mana negara berpendapatan menengah kesulitan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga sulit untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi yang baru. Kompleksitas ekonomi yang meningkat mampu membawa bermacam manfaat bagi suatu negara, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, seperti yang disebutkan oleh Erkan & Ceylan (2021). Oleh karena itu, peningkatan dalam kompleksitas ekonomi diharapkan dapat membantu suatu negara melepaskan diri dari jebakan pendapatan menengah. (Palupi, 2022)

Menurut Gill dan Kharas (2007), Middle Income Trap adalah fenomena di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara melambat dan terjebak dalam status negara berpendapatan menengah. Konsep ini muncul setelah mengamati penurunan kinerja ekonomi negara-negara Asia Timur yang sebelumnya dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang spektakuler. Secara lebih spesifik, Middle Income Trap menggambarkan ketidakmampuan suatu negara untuk bersaing dalam hal biaya tenaga kerja pada ekspor manufaktur, serta dalam menciptakan produk dengan inovasi dan teknologi tinggi. (Asmirawati, 2017).

B. Pengertian Kebijakan Moneter Dan Fiskal

Kebijakan moneter adalah salah satu kebijaksanaan ekonomi makro yang diaplikasikan bersamaan dengan daur aktivitas ekonomi. Bagi Mishkin (2004), kebijaksanaan moneter merujuk pada seluruh tahap ataupun aksi yang didapat oleh bank esensial buat pengaruhi bermacam variabel moneter, semacam jumlah dana yang tersebar, tingkatan suku bunga, ketersediaan angsuran, serta nilai tukar. Tujuan dari kebijaksanaan moneter ini merupakan buat menggapai target ekonomi tertentu. (Paramita, 2021). Kebijakan moneter merupakan

kebijaksanaan daulat moneter ataupun bank esensial dalam wujud pengaturan jumlah dana buat menggapai kemajuan aktivitas ekonomi yang di inginkan, ialah kemantapan ekonomi makro, yang terlihat antara lain dari kemantapan harga (tingkatan inflasi) serta perkembangan ekonomi. (Nurul, 2020)

Instrumen kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia (BI), mencakup pengelolaan jumlah uang beredar serta pengaturan suku bunga seperti BI Rate. Kebijakan moneter tujuan utamanya ialah terjaganya stabilitas harga dengan mengatur peredaran uang dan tingkat suku bunga yang berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Pada konteks perekonomian Indonesia, inflasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Kenaikan inflasi wajib dikelola dengan bermacam kebijakan, termasuk kebijakan moneter dari BI dan kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan kenaikan inflasi sebesar 1% saja dapat menjadi perhatian serius karena dapat mengakibatkan penurunan nilai uang atau daya beli masyarakat. Jika inflasi berada pada tingkat yang sangat tinggi, hal ini akan lebih lanjut menurunkan nilai uang dan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa dengan nominal yang sama. (Saragih, 2015)

Penerimaan serta pengeluaran Negara diatur oleh kebijakan fiskal. Penerimaan negara asalnya dari bermacam sumber, misal pajak, penerimaan non-pajak, serta dalam beberapa kasus, pinjaman dari luar negeri atau bantuan internasional, yang sebelum reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara. Kebijakan fiskal maksud utamanya guna mengelola keuangan negara secara efektif sehingga dapat mendukung berbagai aspek perekonomian nasional, seperti produksi, konsumsi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas harga.

C. Penyebab terjadinya middle income trap

Sebuah negara dapat terperangkap dalam Middle Income Trap (MIT) jika tingkat pendapatannya stagnan selama periode yang panjang. Menurut definisi ini, sebuah negara yang memiliki pendapatan yang sama selama 28 tahun dapat dianggap terjebak dalam MIT. Saat ini, Indonesia telah diklasifikasikan sebagai negara dengan pendapatan menengah ke bawah selama 25 tahun, menurut penelitian oleh Lumbangaol dan Pasaribu (2018), yang menegaskan bahwa Indonesia mengalami MIT. Untuk keluar dari MIT, Indonesia perlu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam konteks ini, diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berada di sekitar 6,5% per tahun selama sepuluh tahun ke depan.

Indonesia, sebagai negara berkembang berpenghasilan menengah ke atas, sering kali disorot karena pertumbuhan ekonominya yang kuat dan signifikan di tingkat internasional. Pemerintah pusat telah memberikan dukungan yang besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas, yang membantu meningkatkan peran industri manufaktur dalam ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi di Indonesia telah berpengaruh dalam jangka panjang terhadap pendapatan riil per kapita negara ini. Melihat dari perkembangan pendapatan per kapita, Indonesia berhasil meningkatkan statusnya dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah. Meskipun demikian, data dari Bank Dunia tahun 2014 menunjukkan bahwa GNI per kapita Indonesia pada tahun 2013 masih berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan ini cenderung dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, sedangkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Ketidakmerataan dalam distribusi peningkatan pendapatan ini merupakan salah satu menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi lambat. Kalau keadaan ini tidak ditangani dengan baik, bisa memperburuk ketimpangan dan kemiskinan di masa depan. Dalam konteks ini, peluang Indonesia buat terjebak dalam Middle Income Trap (MIT) semakin besar.

D. Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Middle Income Trap

Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, mencapai sekitar 5% per tahun dari tahun 2015 sampai 2018, yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan negara-negara berkembang lainnya di dunia yang sekitar 4,5% per tahun. Berbagai sektor ekonomi berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif ini. Industri jasa, terutama industri jasa informasi dan komunikasi serta industri transportasi dan perdagangan, masing-masing tumbuh sekitar 8,8% dan 7,4% per tahun. Sektor industri pengolahan juga mengalami peningkatan sekitar 4,3% per tahun. Sementara itu, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sekitar 3,7% per tahun, yang didorong oleh perbaikan infrastruktur pertanian yang meningkatkan produktivitas. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah meningkat sekitar 3,0% per tahun meskipun menghadapi tekanan dari penurunan pendapatan negara. Investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sekitar 5,6% per tahun.

Dukungan terhadap pertumbuhan investasi terutama datang dari reformasi investasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan layanan investasi.

Stabilitas makroekonomi juga terjaga dengan peningkatan cadangan devisa, defisit transaksi berlangsung yang tetap terkendali, serta inflasi dan nilai tukar yang stabil (BAPPENAS, 2019). Pertumbuhan ekonomi Indonesia, setelah mengalami stagnasi pasca krisis ekonomi 1998, rata-rata tumbuh sekitar 5,3% per tahun. Dalam empat tahun terakhir (2015-2018), pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di sekitar 5%. Dampak dari stagnasi pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan Indonesia terjebak dalam Middle Income Trap, tidak mampu mencapai status negara berpendapatan tinggi. Produktivitas yang rendah serta transformasi struktural yang lambat menyebabkan stagnasi ekonomi. Faktor-faktor penghambat meliputi regulasi yang kompleks, birokrasi yang menghambat, sistem perpajakan yang belum memadai, mutu serta produktivitas tenaga kerja yang rendah, sektor keuangan yang minim intermediasi, serta infrastruktur yang masih kurang baik dalam konektivitas dan energi. (BAPPENAS, 2019).

Kebijakan ekonomi Indonesia merujuk pada tahapan yang diambil pemerintah untuk mengatur perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang menjadi salah satu terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan anggota G-20 dan memiliki ekonomi terbesar kesepuluh berdasarkan paritas daya beli. Sejak krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, Indonesia telah mengalami perbaikan ekonomi yang signifikan. Produk Domestik Bruto (PDB) nasional meningkat dari \$857.807 pada tahun 2000 menjadi \$3.874.7 pada tahun 2018. Meskipun tantangan tetap ada, prospek ekonomi Indonesia diyakini akan membaik, didorong oleh permintaan domestik yang kuat. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5,2%, didukung oleh investasi yang solid, inflasi yang stabil, dan pasar tenaga kerja yang kuat.

Indonesia, sebuah negara berkembang, sedang berusaha untuk menyiapkan diri menuju status negara maju pada tahun 2030. Persiapan ini dilakukan sebagai respons terhadap fenomena globalisasi, dengan fokus utama pada kemajuan ekonomi. Langkah-langkah persiapan ini termasuk reformasi dalam pemerintahan dan kerja sama erat dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Transformasi ekonomi menjadi salah satu strategi utama yang dilakukan Indonesia. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan terjebak dalam Middle Income Trap (MIT), yang jika tidak diatasi dengan baik, dapat berpotensi menimbulkan ketidakstabilan

ekonomi di masa depan (World Bank, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Gill & Kharas (2015) menyoroti bahwa negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia, menghadapi risiko terjebak dalam MIT. Studi ini memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan ekonomi untuk mengimplementasikan strategi pertumbuhan yang efektif, seperti fokus pada sektor manufaktur yang berorientasi ekspor untuk memanfaatkan tenaga kerja dengan biaya relatif rendah, serta meningkatkan investasi dalam kesehatan dan pendidikan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja. (Gill & Kharas, 2007)

Secara konseptual, Middle Income Trap adalah fenomena yang pertama kali dikemukakan dalam laporan Bank Dunia tahun 2007 berjudul "An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth" (Gill & Kharas, 2007). Definisi lain menyebutkan Middle Income Trap sebagai kondisi di mana negara-negara dengan pendapatan menengah kesulitan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi (Aviliani et al., 2014). Hal ini terjadi ketika strategi pertumbuhan ekonomi negara tidak sesuai dengan karakteristik struktural perekonomian mereka, yang mengarah pada dua jenis perangkap yang umum dialami oleh negara-negara dengan pendapatan menengah. Salah satunya adalah upaya negara-negara ini untuk mempertahankan sektor manufaktur padat karya guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun terdapat tantangan kompetitif akibat tingginya biaya tenaga kerja (Gill & Kharas, 2015).

Menurut penelitian (Cai, 2012), negara-negara yang terjebak dalam Middle Income Trap mengalami fenomena di mana mereka mengalami periode pembangunan yang panjang pada tingkat pendapatan menengah, namun ketika mencoba untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, mereka malah terjebak dalam perangkap ini. Negara-negara berpendapatan menengah seringkali tidak dapat memanfaatkan globalisasi dengan optimal karena kurang memiliki keunggulan komparatif dalam teknologi dan tenaga kerja industri yang intensif, yang menyebabkan mereka terjebak dalam middle income trap. Menurut penelitian (Cai, 2012), negara-negara yang terjebak dalam Middle Income Trap mengalami fenomena di mana mereka mengalami periode pembangunan yang panjang pada tingkat pendapatan menengah, namun ketika mencoba untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, mereka malah terjebak dalam perangkap ini. Negara-negara berpendapatan menengah seringkali tidak dapat memanfaatkan globalisasi dengan optimal karena kurang memiliki keunggulan komparatif

dalam teknologi dan tenaga kerja industri yang intensif, yang menyebabkan mereka terjebak dalam middle income trap.

Kesuksesan pembangunan ekonomi di sesuatu negara pada dasarnya tergantung pada susunan aktivitas yang lagi ataupun lalu berjalan buat menghasilkan situasi yang lebih bagus dengan cara simultan serta tidak berubah-ubah. Salah satu penanda pembangunan ekonomi merupakan perkembangan ekonomi, yang mencerminkan akibat jelas dari kebijaksanaan pembangunan pemerintah lewat bermacam wujud kebijaksanaan. Pengeluaran pemerintah ialah salah satu metode buat menggapai tujuan menciptakan kelimpahan untuk semua orang. Bagi pemikiran Keynesian, campur tangan pemerintah lewat pengeluaran bisa memicu tingkatan permohonan agregat yang pada kesimpulannya mendorong perkembangan ekonomi. Opini ini berlainan dengan pemikiran Adam Smith, yang mensupport opini kalau sistem rezim Laissez-Faire sepatutnya tidak turut campur tangan serta membiarkan sistem pasar leluasa mendorong kemakmuran bangsa (Ogundipe & Oluwatobi, 2013; Folster, 2001). Kesehatan perekonomian sangat tergantung pada kebijakan pemerintah terkait kebijakan moneter dan fiskal, termasuk pengaturan jumlah uang beredar, pengendalian inflasi, pengeluaran pemerintah, dan pengaturan pendapatan negara. Dalam menghadapi kondisi yang sesungguhnya, kebijakan moneter dan fiskal harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi yang sedang berlangsung, mengingat adanya ketidakpastian yang mungkin terjadi.

E. Peran Pemerintah Dalam Menangani Middle Income Trap Secara Umum

Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan industri berbasis ekspor dan deregulasi investasi sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat bersaing di tingkat regional maupun internasional. Target tingkat pertumbuhan ekspor Indonesia harus mencapai 9,8% per tahun, dengan total investasi mencapai 35 ribu triliun pada tahun 2024 untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Untuk sektor ekspor, penting untuk mengoptimalkan keterkaitan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan sektor industri guna memaksimalkan tambahan demografi Indonesia. Dengan penyesuaian ini, diharapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dapat ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri juga perlu diperkuat agar Indonesia dapat meningkatkan kapasitas produksi barang yang dapat diekspor. Selain itu, pemerintah perlu memfokuskan pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk

meningkatkan nilai ekspor, seperti agribisnis, suku cadang, dan komponen. Di sektor investasi, diperlukan peningkatan kerja sama baik secara bilateral, regional, maupun internasional, dengan memberikan insentif-insentif yang menarik untuk memperkuat kerja sama tersebut. Investasi yang sedang berjalan di Indonesia diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, sementara pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya yang telah direncanakan. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan kondisi yang terkait dengan Masyarakat Informasi Terhubung (MIT). Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menekankan pentingnya strategi yang efisien agar Indonesia dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kondisi saat ini masih mengharuskan Indonesia untuk tetap memperhatikan tantangan MIT, terutama terkait proporsi penduduk usia produktif yang lebih kecil dibandingkan dengan usia tidak produktif.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah solutif untuk mengatasi tantangan ini, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Hal ini menegaskan pentingnya sumber daya manusia dalam proses pembangunan. Reformasi sektor kesehatan dan pendidikan menjadi krusial dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Di tengah pandemi saat ini, upaya penanganan kesehatan sangat bergantung pada langkah-langkah pemerintah pusat dan sistem kesehatan daerah. Indonesia dapat memperoleh inspirasi dari praktik-praktik positif negara lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk pemerataan akses ke fasilitas kesehatan dasar. Di bidang pendidikan, reformasi juga mendesak dilakukan, dengan pendekatan yang semakin mengintegrasikan teknologi. Di masa pandemi, teknologi menjadi kunci penting, terutama dalam mendukung proses pembelajaran bagi siswa. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap generasi milenial dan generasi muda lainnya dapat menjadi "generasi emas" yang meraih masa depan yang cerah. Jaringan pengaman sosial juga menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan dan mengatasi berbagai tantangan, termasuk masalah ketahanan ekonomi. Menteri Keuangan juga menekankan bahwa desain jaringan pengaman sosial yang efektif tidak hanya memberikan kepastian bagi masyarakat untuk maju, tetapi juga memberikan perlindungan bagi keluarga dan anak-anak dari

risiko kemiskinan. Saat ini, pemerintah tengah merancang reformasi jaringan pengaman sosial yang tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memperkuat keberlanjutan dan perlindungan bagi mereka yang rentan tertinggal.

2. Transformasi Ekonomi

Transformasi yang telah dilakukan mencakup sektor manufaktur dan memperkuat struktur ekonomi Indonesia yang utamanya terdiri dari UMKM. Menurut Menteri Keuangan, terdapat beberapa konsep penting terkait hal ini, seperti peningkatan kualitas hidup, produktivitas yang lebih baik di sektor pertanian, dan transformasi sektor jasa untuk menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja yang berkelanjutan. Ini merupakan hal-hal yang dianggap penting oleh Menkeu terkait dengan perubahan ekonomi ini.

3. Peningkatan Produktivitas Sektor Agrikultur

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan mengeluarkan negara dari zona MIT, langkah yang dianjurkan termasuk modernisasi sektor pertanian dengan fokus pada peningkatan produktivitas. Menurut Outlook Ekonomi Pertanian 2021, sektor pertanian diperkirakan akan tumbuh antara 3,30% hingga 4,27%. Selain itu, subsektor peternakan juga diproyeksikan mengalami pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan antara 3,72% hingga 4,68%, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020.

4. Transformasi Sektor Manufaktur

Indonesia perlu menitikberatkan perhatiannya pada sektor manufaktur sebagai strategi untuk mempercepat kemajuan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan fokus ini harus disertai dengan reformasi struktural yang signifikan di sektor manufaktur. Dengan memperkuat kontribusi sektor manufaktur dalam kerangka pembangunan ekonomi Indonesia, akan tercipta lebih banyak peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia juga akan meningkatkan pendapatan nasional dan berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita. Selain itu, sektor manufaktur memiliki peran krusial dalam mendorong investasi dan ekspor, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Saat ini, sektor manufaktur Indonesia berkontribusi sebesar 20 persen terhadap PDB, menyumbang sekitar 30 persen dari pendapatan pajak, dan menghasilkan 74 persen dari total ekspor negara.

Sebuah struktur ekonomi yang kokoh bagi suatu negara terdiri dari tiga sektor utama: pertanian, manufaktur, dan jasa. Untuk mencapai status negara maju, suatu negara perlu melewati tahapan transformasi ketiga sektor ini. Saat ini, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan di sektor pertanian, namun belum sepenuhnya menunjukkan perkembangan yang memadai di sektor manufaktur sebelum bergerak ke sektor jasa. (Lumbangaol & Pasaribu, 2018)

F. Peran Pemerintah Dalam Menangani Middle Income Trap Secara Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, mengatasi middle income trap di Indonesia bukan hanya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Hal ini penting agar akselerasi pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat secara inklusif.

Meskipun terjadi kemajuan ekonomi di beberapa bagian timur Indonesia, seperti Sulawesi, kontribusi PDRB terhadap PDB antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam 30 tahun terakhir hampir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan dorongan industrialisasi di luar Jawa, didukung dengan peningkatan konektivitas dan sistem logistik nasional untuk mempercepat pembangunan di Indonesia Timur. Penting juga untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Islam menekankan pemerataan pendapatan sebagai bentuk pelaksanaan keadilan yang dianjurkan oleh Al-Quran. Prinsip "agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja" menjadi dasar pembangunan ekonomi dalam Islam.

Rasio Gini Indonesia saat ini mengkhawatirkan, sehingga tanpa langkah-langkah strategis dan program-program yang tepat, ketimpangan ini akan semakin membesar. Sebuah studi yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Prof. Dr. Bambang Brojonegoro (2013), menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat dan jumlah kelas menengah tumbuh pesat, angka kemiskinan juga naik, sementara pendapatan masyarakat miskin tetap rendah. Seperti yang dikatakan dalam lagu Rhoma Irama, "Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin".

Oleh karena itu, peran pemerintah tidak hanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita menuju negara berpendapatan tinggi, tetapi juga penting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi Middle Income Trap secara syariah. Salah satu contoh adalah dengan menerapkan keuangan syariah yang berfokus pada asas keadilan, transparansi, dan tata kelola yang baik. Keuangan syariah ini diharapkan dapat membantu mengatasi birokrasi, korupsi, dan masalah lain yang terkait dengan Middle Income Trap. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menekankan pentingnya keuangan syariah dalam mengatasi Middle Income Trap karena nilai-nilai yang diterapkan dapat menjadi landasan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.

G. Kebijakan Moneter Dan Fiskal Yang Bijak Dapat Membantu Indonesia Keluar Dari Middle Income Trap

- **Kebijakan Moneter**

Stabilisasi Harga: Menjaga stabilitas harga dengan mengatur suku bunga dan likuiditas.

Pengaturan Uang Beredar: Mengatur jumlah uang beredar untuk mengontrol inflasi dan mempertahankan nilai rupiah.

- **Kebijakan Fiskal**

Pengelolaan Anggaran: Mengelola anggaran pemerintah dengan efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi defisit anggaran.

Pengelolaan Pajak: Mengelola pajak dengan efektif untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang.

- **Koordinasi Kebijakan:**

Melakukan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal guna tercapai maksud yang sama, misal stabilitas harga serta sehatnya pertumbuhan ekonomi

- **Pengelolaan Utang:**

Mengurangi Utang: Mengurangi ketergantungan pada utang dengan meningkatkan pendapatan negara dan mengelola anggaran dengan efektif.

- **Pengelolaan Inflasi:**

Mengelola Inflasi: Mengelola inflasi dengan efektif untuk terjaganya stabilitas harga serta mempertahankan nilai rupiah.

Dengan demikian, kebijakan moneter dan fiskal yang bijak dapat membantu Indonesia keluar dari middle income trap dengan mengatur stabilitas harga, mengelola anggaran dan pajak, serta mengurangi ketergantungan pada utang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang sering digunakan sebagai metode ilmiah oleh sejumlah peneliti dalam ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu pendidikan. Peneliti memiliki peran buat mengumpulkan data dengan studi dokumen di dalam riset kualitatif. Peneliti mengumpulkan data tentang pengaruh kebijakan moneter dan fiskal dalam fenomena middle income trap di Indonesia. Pengumpulan data kualitatif ini dilakukan melalui kajian pustaka dari sumber sumber rujukan yang relevan dari jurnal dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut klasifikasi Bank Dunia, Indonesia diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah selama 13 tahun belakangan. Perihal ini membuktikan jikalau ekonomi Indonesia tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan (peningkatan pendapatan per kapita Indonesia cukup konstan) dalam kurun waktu yang cukup lama serta menjadikan potensi Indonesia untuk masuk ke dalam MIT menjadi sangat besar.

Middle income trap (MIT) ialah sesuatu keadaan yang mana negara-negara berpendapatan menengah berjuang guna pertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan cukup untuk mencapai status pendapatan tinggi. Dalam studi lain, MIT mengacu pada keadaan di mana sesuatu negara alami stagnasi pertumbuhan pada tingkat pendapatan menengah dan gagal mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan status pendapatan tinggi. Negara-negara yang tergabung dalam MIT mendapati diri mereka tidak mampu bersaing dengan negara-negara berpendapatan rendah dalam hal biaya tenaga kerja manufaktur, dan tidak mampu bersaing dengan negara-negara berpendapatan tinggi dalam hal kemajuan keterampilan dan inovasi.

Suatu negara bisa masuk dalam MIT jika tingkat pendapatannya tetap sama selama 28 tahun. Masa kini, Indonesia sudah masuk dalam kategori berpendapatan menengah ke bawah selama 25 tahun. Hal ini diperkuat dengan riset yang dikerjakan oleh Lumbangaol dan Pasaribu (2018) yang menunjukkan jika Indonesia memang pernah berhadapan dengan MIT. Untuk keluar dari MIT, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekitar 6,5%

selama dekade berikutnya. Indonesia, sebuah negara berkembang dengan kategori pendapatan menengah ke atas, sering diakui memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan signifikan di tingkat internasional. Ini terjadi karena pemerintah pusat telah memberikan dukungan yang besar untuk mengurangi ketergantungan negara ini pada ekspor komoditas, sehingga mendorong peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mempengaruhi pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang, dengan angka sekitar 4,5% per tahun, lebih tinggi dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Berbagai sektor, termasuk industri jasa seperti informasi dan komunikasi serta transportasi dan perdagangan, telah tumbuh dengan signifikan, masing-masing mencapai 8,8% dan 7,4% per tahun. Industri pengolahan juga mengalami peningkatan sekitar 4,3% per tahun, sementara pertanian tumbuh sekitar 3,7% per tahun berkat perbaikan infrastruktur. Di sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah meningkat sekitar 3,0% per tahun meskipun menghadapi tekanan dari penurunan pendapatan negara. Investasi, yang tumbuh sekitar 5,6% per tahun, menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi didukung oleh reformasi iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan layanan investasi.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia terhambat oleh rendahnya tingkat produktivitas dan ketidakmampuan transformasi struktural yang efektif. Beberapa faktor penghambat termasuk regulasi yang kompleks dan tumpang tindih, birokrasi yang menghambat, sistem perpajakan yang belum memadai, serta mutu dan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Selain itu, sektor keuangan yang kurang berkembang dan infrastruktur yang masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam konektivitas dan penyediaan energi, juga menjadi kendala utama.

Indonesia telah menjalankan kebijakan ekonominya untuk mengatur dan memajukan pertumbuhan ekonomi, menjadi salah satu dari anggota G-20 dengan populasi keempat terbesar di dunia dan ekonomi terbesar kesepuluh berdasarkan paritas daya beli. Sejak krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, Indonesia telah mengalami perbaikan signifikan dalam PDB nasionalnya, yang meningkat dari \$857,8 miliar pada tahun 2000 menjadi \$3,8747 triliun pada tahun 2018. Meskipun ada ketidakpastian, ekonomi Indonesia diperkirakan akan membaik, didorong oleh permintaan domestik yang kuat, investasi yang solid, inflasi yang stabil, dan pasar tenaga kerja yang kokoh. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2% pada tahun 2019.

Konsep "Jebakan Pendapatan Menengah" pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 dalam laporan Bank Dunia yang berjudul "Renaissance Asia Timur: Gagasan untuk Pertumbuhan Ekonomi". Istilah ini mengacu pada situasi di mana negara-negara berpenghasilan menengah menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten untuk naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Negara-negara ini cenderung mengalami tantangan dalam menyesuaikan strategi pertumbuhan mereka dengan karakteristik struktural yang ada di ekonomi mereka. Di satu sisi, negara-negara berpenghasilan menengah berusaha mempertahankan sektor manufaktur padat karya sebagai penggerak utama pertumbuhan, meskipun menghadapi tantangan kompetitif akibat biaya tenaga kerja yang meningkat.

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada rangkaian aktifitas yang sedang berlangsung atau terus berlanjut guna terciptanya keadaan yang lebih baik secara serentak serta konsisten. Salah satu indikator penting dari pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, yang merupakan hasil nyata dari kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan. Pengeluaran pemerintah menjadi salah satu cara untuk mencapai harapan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Menurut pemikiran kelompok Keynesian, intervensi pemerintah melalui pengeluaran dapat merangsang tingkat permintaan agregat yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini bertentangan dengan pemikiran Adam Smith yang mengusulkan sistem pemerintahan Laissez-Faire, di mana pemerintah seharusnya tidak ikut campur tangan dan membiarkan pasar bebas untuk mendorong kemakmuran suatu bangsa (Ogundipe & Oluwatobi, 2013; Folster & Henrekson, 2001).

Kesehatan perekonomian sangat tergantung pada kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan pemerintah, khususnya dalam mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan tingkat inflasi, mengelola pengeluaran pemerintah, dan mengatur penerimaan negara. Dalam menghadapi ketidakpastian yang ada, kebijakan moneter dan fiskal harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi riil yang sedang berlangsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai penjabaran tersebut kita bisa menarik kesimpulan mengenai pengaruh kebijakan moneter dan fiskal dalam fenomena middle income trap di Indonesia adalah stabilitas ekonomi

melalui Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia, seperti pengendalian inflasi dan penetapan suku bunga, sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Stabilitas ini esensial buat terdorongnya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang membantu Indonesia menghindari middle income trap. Peningkatan Produktivitas melalui Kebijakan fiskal, termasuk pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, memainkan peran kunci dalam tingkatan produktivitas serta daya saing ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkesinambungan didukung oleh investasi ini. Koordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan fiskal sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi yang positif. Koordinasi ini dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain kebijakan moneter dan fiskal, reformasi struktural yang mencakup peningkatan mutu sumber daya manusia, efisiensi birokrasi, dan inovasi teknologi diperlukan untuk mengatasi hambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang sesuai dengan prinsip syariah, didukung oleh reformasi struktural yang berkelanjutan, sangat penting bagi Indonesia untuk mengatasi middle income trap dan mencapai status negara berpendapatan tinggi dalam kerangka ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, Oleh karena itu, beberapa saran sangat diajukan agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap, antara lain dengan tingkatan investasi asing dengan perbaikan faktor-faktor pendukung infrastruktur, inovasi kebijakan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan kunci untuk memanfaatkan potensi Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh negara penerima investasi asing terbesar di Asia. Peningkatan dalam investasi tetap bruto harus difokuskan pada berbagai sektor, termasuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, karena tenaga kerja yang terampil mampu meningkatkan produktivitas secara efisien. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendorong inovasi dalam produksi yang berorientasi pada nilai tambah tinggi, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan tambahan demografi yang akan datang, penting untuk memastikan bahwa kualitas sumber daya manusia dapat memenuhi permintaan di pasar tenaga kerja. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan masalah pengangguran yang serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmirawati. (2017). Analisis Middle Income Trap di Indonesia. *Journal Ecosains*, 3.
- Lumbangaol, H. E., & Pasaribu, E. (2018). Eksistensi dan determinan middle income trap di indonesia. *Jurnal Ekonomi & kebijakan publik*, 92.
- Malale, A. W., & Sutikno, M. A. (2014). Analisis Middle Income Trap di Indonesia. *Jurnal BPPK*, 93.
- Nurul, E. M. (2020). Kebijakan Pemerintah Mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate Sebesar 4,50%. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 126.
- Palupi, W. A. (2022). Pengaruh Investasi, Sewa Sumber Daya Alam, dan Pengendali Korupsi Terhadap Kompleksitas Ekonomi. *Klassen*, 1-2.
- Paramita, R. (2021). Efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi di Indonesia periode 1984-2019. *Jurnal Budget*, 155.
- Saragih, J. P. (2015). Bauran Kebijakan Moneter - Fiskal terhadap pencapaian target inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. *Julia Panglima Saragih*, 163-164.
- Widyastuti, O. R. (2023). Middle Income Trap di Indonesia dan Analisisnya. *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 160.